



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HAMZAH
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK : 507445

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp.

3.880.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 360 m2/720 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 391 m2/782 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 540.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 251 m2/251 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , Rp. 120.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 377 m2/377 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , Rp. 200.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 377 m2/377 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , Rp. 180.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 433 m2/433 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , Rp. 200.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 433 m2/433 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , Rp. 150.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/500 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , Rp. 200.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 433 m2/433 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , Rp. 150.000.000



10. Tanah Seluas 2.500 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI
Rp. 185.000.000

11. Tanah Seluas 10.000 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI
Rp. 155.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 190.000.000

1. MOBIL, AVANSA G Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000

2. MOBIL, ZUSUKI OPEN CAP Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 195.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 11.710.247

F. HARTA LAINNYA Rp. 126.000.000

Sub Total Rp. 4.402.710.247

III. HUTANG Rp. 110.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 4.292.710.247

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MAHFUDIN
2. Jabatan : PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
3. NHK : 998548

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	127.500.000
1. MOBIL, HONDA ACCORD Tahun 2008, HASIL SENDIRI	Rp.	
100.000.000		
2. MOTOR, HONDA FINO Tahun 2016, HASIL SENDIRI	Rp.	
7.500.000		
3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2024, HASIL SENDIRI	Rp.	
20.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	30.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	71.578.244
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	229.078.244
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	229.078.244

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi



pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : BENI PRABOWO
2. Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN
3. NHK : 932491

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 186.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 820 m2/140 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, Rp. 186.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 11.000.000

1. MOTOR, YAMAHA JUPITER MX Tahun 2005, HIBAH TANPA AKTA Rp. 2.500.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 5.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 202.000.000

III. HUTANG Rp. 75.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 127.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi



pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUH. ARFAH H.
2. Jabatan : BENDAHARA PENERIMAAN
3. NHK : 236515

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	23.000.000
1. MOTOR, YAMAHA METIK Tahun 2017, HASIL SENDIRI	Rp.	
6.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA METIK Tahun 2020, HASIL SENDIRI	Rp.	
17.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	830.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	23.830.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 23.830.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.